



Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur

Livia Almeyda Koswara^{1✉}, Evi Priyanti², Lina Aryani³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 1910631180177@student.unsika.ac.id^{1✉}

Abstrak

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan tanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana infrastruktur pembangunan yang sedang dijalankan dan direncanakan oleh kelurahan Palumbonsari. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian deskriptif adalah proses penelitian yang dimulai dengan menyusun asumsi-asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dari hasil penelitian ini infrastruktur pembangunan di kelurahan palumbonsari belum berjalan dengan baik. Kelurahan Palumbonsari diharapkan untuk lebih berkomunikasi dan bermusyawarah dengan masyarakat setempat dan lebih mengembangkan kembali sosialisasi kepada masyarakat terkait infrastruktur pembangunan di Kelurahan Palumbonsari karena tidak adanya transparansi antara pemerintah Kelurahan Palumbonsari dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat tidak mengetahui apa saja pembangunan yang akan dijalankan dan sedang direncanakan sehingga prinsip-prinsip good governance tidak berjalan dengan baik di Kelurahan Palumbonsari.

Kata Kunci : *Good Governance, Transparansi, Pembangunan Infrastruktur*

Abstract

Good Governance is the implementation of solid and responsible development management that is in line with the principles of democracy and efficient markets, avoiding misallocation of investment funds and preventing corruption both politically and administratively. The aim of this research is to find out the extent of development infrastructure that is being implemented. and planned by the Palumbonsari sub-district. In this research, descriptive qualitative research methods are used. Descriptive research is a research process that begins by compiling basic assumptions and rules of thinking that will be used in the research to understand the phenomena experienced by the research subjects. From the results of this research, development infrastructure in Palumbosari sub-district has not been going well. Palumbinsari Village is expected to communicate and consult more with the local community and further develop outreach to the community regarding development infrastructure in Palumbonsari Village because there is no transparency between the Palumbonsari Village government and the surrounding community so that the community does not know what development will be carried out and is being planned so that the principle -the principles of good governance do not work well in Palumbosari Village.

Keywords : *Good Governance, Transparency, Infrastructure Development*

PENDAHULUAN

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya.

Untuk itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimana Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Sedarmayati (2007:76) good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (agent of change) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam good governance tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasiasosiasi kerja, bahkan paguyuban.

Penerapan good governance dapat dilihat dalam berbagai kegiatan pelayanan seperti surat keterangan usaha namun pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat teras pemerintah. Ditambah lagi perilaku para penyelenggara negara di daerah ini (baik itu penyelenggara pemerintah maupun legislatif) yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemerintah. masalah akuntabilitas dalam pelayanan, belum adanya pertanggungjawaban yang jelas mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat, Kurangnya kesadaran tentang kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan dinilai menjadi faktor penyebab tingkat kinerja yang buruk. "good governance" sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik good and services. Sedangkan arti "good" dalam "good governance" mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut "good governance" atau pemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian "good governance" didefinisikan sebagai "penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab,serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yng konstruktif di antara domain- domain Negara, sektor swasta dan masyarakat" Menurut Riswanda Imawan (2012:32) "good governance" diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (the way state power is used in managing economic and social resources for development of society). pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (agent of change) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam good governance tidak hanya pemerintah, dibidang ekonomi didalam negeri dan interaksi diantara pelaku ekonomi. Pemerintahan politik fungsinya menyangkut proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Pemerintahan administrasi adalah system pelaksanaan proses kebijakan.

Good governance adalah sebuah sistem yang dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan dari pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan,

profesionalisme, dan demokratis. Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu juga masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lambat, tidak profesional, dan biayanya mahal. Sebagai instansi pemerintah pasti kantor camat ini juga pernah mengalami masalah dalam pemerintahan yang buruk. Prinsip-prinsip good governance seharusnya sudah dipahami dan diterapkan oleh semua Instansi Pemerintah di Indonesia baik di pusat maupun di daerah.

Pemerintah Daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip good Governance (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik) Serta harus sinergis dengan pemerintah pusat. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, prinsip good Governance dalam praktiknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik termasuk dalam menjalankan pelayanan publik perlu adanya prinsip-prinsip good Governance.

Dalam pembangunan yang dilakukan Kelurahan Palumbonsari kurang adanya Transparansi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kelurahan dimana dapat diartikan kurang diterapkannya Prinsip-prinsip good governance dimana salah satu adalah Transparansi namun dalam Kelurahan Palumbonsari kurang diterapkan sehingga warga tidak mengetahui apa saja yang sedang direncanakan atau di rancang dalam pembangunan apa saja yang pemerintah kelurahan rencanakan. Dalam upaya menangani patologi birokrasi di Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang timur dalam hal Transparansi pembangunan, dimana warga pun berhak tau pembangunan apa saja yang sedang di upayakan atau di rencanakan karena hasil pembangunan tersebut pun akan di rasakan oleh masyarakat. Dalam menangani penanganan upaya patologi birokrasi di Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang timur, peneliti mewawancarai Sekretaris kelurahan palumbonsari beliau memang tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai apa yang sedang di kerjakan.

Di kelurahan palumbonsari, kecamatan Karawang Timur penerapan good governance dapat kita lihat dalam berbagai kegiatan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh kelurahan tersebut. Dalam hal ini kelurahan palumbonsari hanya memfokuskan pembangunan roko-roko dengan tujuan untuk membantu masyarakat untuk

meningkatkan ekonominya. Dalam hal ini kelurahan palumbonsari seharusnya tidak perlu hanya memfokuskan pembangunan kesatu arah, masih banyak harus dibangun untuk keperluan masyarakat.

Masalah pembangunan di kelurahan palumbonsari dari yang penulis lihat kantor kelurahan palumbonsari masih harus direnovasi, karena menurut penulis baik buruknya suatu kelurahan/desa kita lihat dulu dari kantornya jika kantornya tidak terurus dengan baik kemungkinan pelayanan dan kebijakannya tidak berjalan dengan baik. Keadaan kantor di kelurahan palumbonsari menurut penulis masih banyak yang harus direnovasi dan ditenahi karena jika dilihat dari kantor kelurahan tidak terurus maka pembangunan-pembangunan di kelurahan tersebut pun masih banyak yang tidak berjalan dengan baik. Kurangnya transparansi juga membuat masyarakat tidak mengetahui perencanaan apa yang akan dilakukan kelurahan, sehingga masyarakat tidak mengetahui dana kelurahan diarahkan kemana. Setiap kantor pemerintah pasti memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan good governance dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelayanan publik. Begitu juga dengan Kelurahan Palumbonsai . dan berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Transparansi di Kelurahan palumbonsari ”.

Tinjauan Pustaka

Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Konsep good governance pada suatu gagasan adanya saling (interdependedence) dan interaksi dari bermacam-macam actor kelembagaan disemua level di dalam Negara tidak boleh ada actor kelembagaan didalam good governance. Lembaga administrative negara memberikan pengertian good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara.

Good Governance diIndonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam

pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance. Menurut Riswanda Imawan (2012:32) “good governance” diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (the way state power is used in managing economic and social resources for development of society).

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sector swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. (Masyarakat Transparansi Indonesia, 202:9 Menurut Sedarmayati (2007:76) good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (agent of change) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang.

Dalam good governance tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi- asosiasi kerja, bahkan paguyuban. Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian Good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundangundangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang dimulai dengan menyusun asumsi-asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan seseorang yang diteliti yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau keyakinan orang yang diteliti. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2012) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument sebagai kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode deskriptif menjelaskan bahwa suatu metode dengan melakukan suatu penelitian yang mengemukakan keadaan sebenarnya yang ada ditempat kejadian, kemudian hasil dari penelitian yang diperoleh itu dilakukan suatu analisa untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang ada.

Secara umum ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, menggunakan data primer dalam penelitian ini : Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini mewawancarai pihak staff KASIE Ekonomi Pembangunan di Kelurahan Palumbonsari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Palumbonsari yang merupakan salah satu kelurahan yang berlokasi di Kecamatan Karawang Timur Kab. Karawang – Jawa Barat Indonesia. Terdiri dari beberapa lingkungan atau dusun dan beberapa pemukiman baru berbentuk perumahan, lingkungan pundong, lamaran, karajan, karees, citeureup, rawabagi, taneuh beureum, perumahan buana asri, perum parahiyan, perum palumbonsari asri, perum green garden dan beberapa perumahan baru lain.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur, penelitian ini melibatkan 2 narasumber yang peneliti wawancarai mengenai permasalahan infrastruktur di Kelurahan Palumbonsari. Kami mewawancarai salah satu staff KASIE Ekonomi dan Pembanguna di Kelurahan palumbonsari yaitu Bapak Indra Sudrajat dan masyarakat. Berikut penjelasan dari hasil wawancara peneliti mengenai pembangunan infrastruktur, kendala dan patologi birokrasi di Kelurahan Palumbonsari.

Pembangunan infrastruktur apa yang sedang dijalankan di kelurahan palumbonsari

Peneliti mendapatkan informasi tentang pembangunan infrastuktur yang sedang dijalankan di Kelurahan Palumbonsari dari KASIE Ekonomi dan Pembangunan Bapak Indra Sudrajat. Bapak Indra mengatakan pembangunan di Kelurahan Palumbosari lebih mengarah kepada pembangunan ruko-ruko dan membuat lahan-lahan untuk pedagang-pedagang kecil dan memperbaiki jalan-jalan yang jelek memperbaiki drainase dan saluran-saluran air. Alasan Kelurahan Palumbonsari fokus terhadap ruko-ruko dan lahan-lahan adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha. Kelurahan Palumbonsari menjalankan pembangunan ini agar dapat membantu para warga di Kelurahan Palumbonsari untuk meningkatkan ekonomi mereka dan mengurangi jumlah pengangguran dan menghindari dari banjir di wilayah tersebut.

Kendala apa yang menghambat pembangunan infrastuktur di kelurahan palumbonsari

Bapak Indra mengatakan yang menghambat pembangunan di Kelurahan Palumbonsari dikarenakan sulitnya pencairan dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari kementrian keuangan yang dihibahkan kepada kabupaten/kota, yang kemudian diberikan kepada Kelurahan Palumbonsari untuk pembangunan infrastruktur.

Patologi Birokrasi apa saja yang ada di Kelurahan Palumbonsari

Bapak Indra mengatakan yang menyebabkan patologi birokrasi di Kelurahan Palumbonsari adalah karena kurangnya komunikasi dengan pimpinan dan Kelurahan Palumbonsari juga belum menemukan pengganti lurah selama 2 tahun yang berdampak pada staff yang lainnya karena hilangnya kendali pemimpin sehingga birokrasi di Kelurahan Palumbonsari tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu hilangnya kekosongan Lurah selama 2 tahun memberikan dampak besar terhadap Kelurahan Palumbonsari yang menyebabkan struktur organisasinya tidak terstruktur dengan baik.

Bagaimana solusi dan pencegahan yang diberikan oleh Kelurahan

Palumbonsari dalam penanggulangan Patologi Birokrasi Kelurahan Palumbonsari Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan KASIE Ekonomi dan Pembangunan solusi yang diberikan adalah untuk kedepannya para staff di Kelurahan mampu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar mengetahui keinginan dan keluhan masyarakat dan dikarenakan kursi lurah sudah kosong selama kurang lebih 2 tahun untuk yang menjadi lurah dikemudian hari dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi.

Hasil penelitian dengan mewawancarai masyarakat tentang pembangunan infrastruktur di Kelurahan Palumbonsari

Peneliti mendapatkan informasi dari hasil mewawancarai salah satu masyarakat di Kelurahan Palumbonsari terkait pembangunan infrastruktur. Masyarakat mengatakan masih adanya permasalahan yang terjadi di Kelurahan Palumbonsari terkait perbaikan jalan yang lama ditangani pengajuan-pengajuan dari masyarakat membutuhkan proses hingga 6 bulan prosesnya dan masih banyak permasalahan yang harus ditangani oleh kelurahan yaitu saluransaluran air yang tidak berjalan dengan baik dan drainase air yang perlu diperbaiki ini bisa menyebabkan potensi banjir di wilayah Kelurahan Palumbonsari, sehingga masyarakat tidak bisa tenang dengan masalah ini. Masalah ini bisa teratasi semua membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan pengajuan harus dilakukan satu persatu mulai dari perbaikan jalan dan mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya banjir ini membutuhkan paling lama mungkin sekitar 6-10 bulan pengerjaan yang maksimal.

SIMPULAN

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa public yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimana Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur, penelitian ini melibatkan 2 narasumber yang peneliti wawancarai mengenai permasalahan infrastuktur di Kelurahan Palumbonsari. Kami mewawancarai salah satu staff KASIE Ekonomi dan Pembanguna di Kelurahan palumbonsari yaitu Bapak Indra Sudrajat dan Masyarakat yaitu mengenai pembangunan infrastuktur apa yang sedang dijalankan Kelurahan Palombonsari, kendala apa yang menghambat pembangunan infrastuktur di kelurahan Palumbonsari, dan Patologi birokrasi yang ada di kelurahan Palumbonsari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, H.M. 2009, Politisasi Birokrasi, Malang: Ash-Shiddiqy Press
- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10-16.
- Salim. (2016), Patologi Birokrasi, [PowerPoint slides].
<https://www.slideshare.net/MuhSalim95/patologi-birokrasi-52463676>
- Sasuang, A., Gosal, R., & Singkoh, F. (2018). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN SURAT KETERANGAN USAHA DI KANTOR KELURAHAN MANEMBONEMBO TENGAH KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Siagian, Sondang, P. 1994, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- SIBARANI, E. N. (2021). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MEDAN TIIMUR